

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Desak Pemprov Bikin Perda

Beberapa proyek dipertimbangkan akan dicoret. Untuk Program Rumah DP Rp 0

JAKARTA—Kalahang DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, untuk melindungi setiap kebijakan yang dibuat dengan peraturan sebagai payung hukum. Tujuannya, agar di kemudian hari kebijakan tersebut tidak menjadi masalah, yang justru berdampak kurang baik.

"Salah satu contoh adalah program rumah DP Rp 0. seharusnya pemprov menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terlebih dahulu. Baru setelah siap silahkan saja memulai pembangunan hunian tersebut," ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, Senin (12/2).

Rio mengungkapkan, idealnya sebelum program rumah DP Rp 0 dilaksanakan, perlu dibuat aturan hukum terlebih dahulu. Misalnya yang menyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan, skema pembayaran, maupun pembiayaannya yang berasal dari APBD DKI Jakarta. Terlebih saat ini, telah ada regulasi terkait kredit properti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Lending to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (peraturan). "Hal ini sangat penting demi kebaikan pemprov dan juga masyarakat yang menjadi calon pembeli rumah DP Rp 0 itu," kata dia.

Tidak hanya aturan, Dwi Rio juga

menyoroti salah satu persyaratan bagi warga untuk rumah vertikal ini. Di mana hanya warga yang bergaji tidak kurang Rp7 juta perbulan yang dapat memiliki rumah DP Rp0. Hal ini dikatakan Dwi Rio menjadikan program DP rumah Rp0 tidak berazas keadilan. Padahal program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran uang mukanya.

Dia mengingatkan upah minimum regional (UMR) untuk DKI Jakarta hanya sebesar Rp3,6 juta per bulan. Ia mengandaikan bunga 7 persen, untuk dapat Rusunami petak seluas 21 meter persegi dengan harga Rp187 juta, seseorang yang bergaji Rp 7 juta harus mencicil 15 tahun dengan angsuran bulanan sekitar Rp 2,1 juta. Apabila dicicil dengan tenor 10 tahun, maka harus membayar sebulan Rp 2.6 juta.

Tetapi kalau Rusunami schargo Rp 320 juta tipe 36 cicilan untuk tenor 15 tahun menjadi Rp3,64 juta. "Dengan demikian apakah dengan UMR Rp 3,6 juta per bulan, seseorang mampu untuk membeli rusun tersebut, meski dp nol persen? Saya kira mustahil bisa membeli," tanya dia.

Sehingga bisa dipastikan bahwa program ini tidak dapat dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya itu, hal lain yang harus dipikirkan ialah andaikan masyarakat mengalami kegagalan membayar cicilan atau macet, siapakah yang akan menanggung?

Kemudian lanjut dia, yang perlu diperhatikan lagi adalah kelanjutan dari program ini. Mengingat masa Jabatan Gubernur hanya 5 tahun. "Apakah ketika gubernur berganti menjamin tidak akan mengganti kebijakan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, ketika pejabat berganti maka kebijakan juga akan berganti," tandas Ketua Alumni GMNI Se-Jakarta Raya itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, mengatakan sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik di Balai Kota. Sandiaga mengatakan pertemuan tersebut untuk menyosialisasikan program rumah DP Rp 0 ke DPRD. "Kami ingin mulai bicara mengenai rumah DP Rp 0. Karena sudah mulai terlihat bentuknya. Kita ingin juga teman-teman di DPRD terkomunikasikan, tersosialisasikan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Sandiaga mengatakan sosialisasi ke DPRD diperlukan untuk menyusun Perda yang mengatur program rumah DP Rp 0. Dia menuturkan ingin segera melaksanakan program tersebut. "Kami juga ikut ingin merangkul teman-teman di DPRD. Karena ada pengembang swasta juga yang mau berpartisipasi di program rumah DP Rp 0 ini. Sambil kita menyiapkan kelengkapan dari pada regulasinya yang nanti rencananya April kita akan bangun terus," jelasnya.

Selengkapnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku bakal menggeber realisasi program hunian DP Rp 0. Anies menargetkan 300.000 unit rumah terbangun dalam waktu 5 tahun. "Kita menyasar sejak kampanye 250-300 ribu unit. Itu angka totalnya," kata Anies. (woki)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Desak Pemprov Bikin Perda

Apa Itu Program Rumah DP Rp 0

- Merupakan salah satu wujud visi menurunkan biaya hidup di Jakarta yang tidak terjangkau bagi sebagian warga, selain mengendalikan harga bahan pokok, memberikan transportasi terintegrasi yang terjangkau (DK OT 10), menyediakan lapangan kerja (DK DCE), dan pendidikan memadai (KIP Plus).
- Salah satu upaya mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok warga Jakarta.
- Pada tahap awal akan dibangun 703 unit hunian vertikal, terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21.
- Lahan yang disediakan mencapai 13 hektare.
- Dana yang sudah disiapkan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 300 miliar.
- Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya.



JAKARTA, 10 MARET 2018